

IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP HAK ASASI MANUSIA DALAM PELATIHAN KEPOLISIAN DI SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA METRO JAYA GUNA MENGATASI AKSI DEMONSTRASI

Muhammad Ichsan Nugraha¹, Nova Monaya, Mulyadi

¹²³Universitas Djuanda

ABSTRAK

Penanganan aksi demonstrasi oleh kepolisian masih menimbulkan tantangan dalam menyeimbangkan penegakan hukum dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Metro Jaya sebagai lembaga pendidikan kepolisian memiliki peran strategis dalam membentuk anggota kepolisian yang profesional dengan pemahaman HAM yang komprehensif, namun efektivitas pelatihan HAM dalam konteks penanganan demonstrasi masih memerlukan kajian mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip HAM dalam pelatihan kepolisian dan mengevaluasi efektivitasnya dalam meningkatkan kemampuan anggota kepolisian menangani aksi demonstrasi dengan pendekatan berbasis HAM. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif, mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan pimpinan lembaga, instruktur, siswa pelatihan, dan bagian kurikulum, disertai observasi langsung terhadap proses pembelajaran serta kajian dokumentasi kurikulum. Hasil penelitian mengungkapkan transformasi signifikan dalam pendekatan pelatihan kepolisian dari model represif menjadi lebih humanis dengan pengembangan kurikulum terpadu yang mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM ke dalam berbagai mata pelajaran, penggunaan metode experiential learning, simulasi berbasis teknologi virtual reality, dan kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil. Latihan fungsi yang dilaksanakan terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman anggota kepolisian mengenai batasan penggunaan kekuatan, pengembangan keterampilan komunikasi persuasif, serta analisis situasional untuk mencegah eskalasi konflik. Meskipun demikian, tantangan implementasi masih ditemukan, meliputi kesenjangan antara teori dan praktik lapangan, keterbatasan waktu pelatihan, resistensi dari beberapa instruktur yang masih menganut paradigma keamanan tradisional, serta kesulitan dalam mengukur perubahan perilaku jangka panjang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan integratif dalam pelatihan HAM berhasil membangun kapasitas anggota kepolisian untuk menangani demonstrasi dengan tetap menghormati HAM, namun diperlukan penguatan pada sistem evaluasi berkelanjutan, program pelatihan penyegaran secara berkala, serta transformasi budaya organisasi yang mendukung penerapan prinsip-prinsip HAM dalam praktik penanganan demonstrasi di lapangan.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Pelatihan Kepolisian, Penanganan Demonstrasi, Sekolah Polisi Negara

PENDAHULUAN

Dinamika masyarakat yang semakin kompleks telah menciptakan tantangan tersendiri bagi institusi kepolisian dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap mengedepankan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Metro Jaya sebagai lembaga pendidikan kepolisian memiliki peran strategis dalam membentuk personel kepolisian yang profesional dan memahami pentingnya implementasi prinsip-prinsip HAM dalam pelaksanaan tugas (Kasbi et al., 2021). Penanganan aksi demonstrasi di wilayah DKI Jakarta menempatkan kepolisian pada situasi yang membutuhkan keseimbangan antara penegakan hukum dan penghormatan terhadap HAM, mengingat demonstrasi merupakan bentuk ekspresi demokrasi yang dijamin oleh konstitusi namun pelaksanaannya harus tetap dalam koridor hukum.

Meningkatnya intensitas aksi demonstrasi di Indonesia, khususnya di Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas politik nasional, telah menciptakan tantangan kompleks bagi jajaran kepolisian. Tantangan ini tidak hanya melibatkan aspek keamanan, tetapi juga membutuhkan pemahaman mendalam tentang HAM untuk menghindari tindakan yang berpotensi melanggar hak-hak demonstran. Kebutuhan akan standarisasi prosedur penanganan demonstrasi yang berbasis HAM menjadi semakin mendesak seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan HAM.

Perkembangan media sosial dan teknologi informasi memberikan dimensi baru dalam penanganan demonstrasi dimana setiap tindakan aparat kepolisian dapat terekam dan tersebar dengan cepat, menciptakan tantangan tambahan dalam menjaga citra institusi dan kepercayaan publik. Situasi ini memperkuat urgensi pembekalan anggota kepolisian dengan pemahaman komprehensif tentang HAM dan keterampilan penanganan demonstrasi yang profesional (Ekatjahjana Widodo, 2015).

Indonesia merupakan negara hukum yang secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, sesuai dengan kesepakatan founding fathers bahwa Indonesia merupakan negara berdasarkan hukum, yang diperkuat dengan empat pilar kehidupan kebangsaan yaitu NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Wawasan Nusantara, dan UUD 1945, di mana segala proses penyelenggaraan pemerintahan berlandaskan pada hukum yang harus merambah ke seluruh aspek kehidupan masyarakat dan terus berkembang untuk menjawab berbagai persoalan, dengan penegakan hukum sebagai wujud nyata negara hukum yang dijalankan oleh penegak hukum yang harus mampu bersinergis dengan masyarakat, dan Kepolisian Negara sebagai organ penting negara yang memiliki tugas dan kewenangan dalam penegakan hukum untuk menjamin kepastian hukum serta menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat (Carenina et. all ,2024):

Pelatihan HAM bagi anggota kepolisian memiliki arti penting dalam membentuk karakter dan profesionalisme aparat penegak hukum yang menghormati hak asasi manusia. Dalam praktiknya, masih terdapat kesenjangan antara standar HAM yang ditetapkan dengan implementasi di lapangan, terlihat dari beberapa kasus penanganan demonstrasi yang masih menimbulkan kritik terkait penggunaan kekuatan yang dianggap berlebihan atau tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip HAM.

Perbedaan sudut pandang antara masyarakat dan kepolisian dalam penanganan demonstrasi mencerminkan kompleksitas tantangan dalam menjaga keseimbangan antara hak berdemonstrasi dan ketertiban umum. Dari perspektif masyarakat, demonstrasi merupakan hak konstitusional yang harus dijamin tanpa pembatasan berlebihan, sementara kepolisian memiliki tugas menjaga keamanan dan ketertiban umum dengan mempertimbangkan berbagai aspek keamanan termasuk potensi gangguan terhadap kepentingan umum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi prinsip hak asasi manusia dalam pelatihan kepolisian di Sekolah Polisi Negara Polda Metro Jaya guna mengatasi aksi demonstrasi, serta untuk mengetahui dan

menganalisis efektivitas pelatihan hak asasi manusia bagi anggota kepolisian di Sekolah Polisi Negara Polda Metro Jaya. Melalui analisis implementasi prinsip-prinsip HAM dalam pelatihan kepolisian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada upaya peningkatan profesionalisme kepolisian dalam penanganan demonstrasi dengan tetap mengedepankan penghormatan terhadap HAM.

METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai implementasi prinsip-prinsip HAM dalam pelatihan kepolisian di Sekolah Polisi Negara Polda Metro Jaya menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian yuridis normatif (Soekanto, 2014), yang menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai objek kajian utama. Pendekatan ini dipilih berdasarkan kebutuhan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial dalam konteks pelatihan HAM di lingkungan kepolisian, dengan memberikan ruang bagi peneliti untuk menggali informasi komprehensif tentang nilai-nilai yang ditanamkan, proses pembelajaran, serta dinamika interaksi antara pelatih dan peserta (Sonata, 2015). Teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui wawancara mendalam dengan pimpinan lembaga, instruktur, siswa pelatihan, dan bagian kurikulum, disertai observasi langsung terhadap proses pembelajaran dan lingkungan pelatihan, serta kajian dokumentasi yang mencakup dokumen kurikulum dan evaluasi. Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif analitis yang melibatkan pengorganisasian data, kategorisasi berdasarkan tema-tema relevan, dan interpretasi mendalam untuk menemukan pola serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi prinsip HAM dalam pelatihan. Validitas penelitian dipertahankan melalui triangulasi data dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber, member checking untuk memverifikasi interpretasi peneliti, serta peer review guna memastikan kredibilitas analisis yang dilakukan. Penelitian dilaksanakan dengan memperhatikan aspek etis termasuk kerahasiaan informan dan

persetujuan tertulis untuk penggunaan data, serta dilakukan di Kantor Sekolah Kepolisian Negara Polda Metro Jaya yang berlokasi di Lido, Bogor, Jawa Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Penelitian yang dilaksanakan di Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Metro Jaya menunjukkan adanya transformasi signifikan dalam pendekatan pelatihan kepolisian terkait penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya dalam konteks penanganan aksi demonstrasi yang beralih dari model represif menjadi lebih humanis dan berorientasi pada perlindungan HAM. Berdasarkan observasi lapangan, terungkap bahwa kurikulum pelatihan di SPN Polda Metro Jaya tidak lagi hanya berfokus pada aspek keamanan dan ketertiban, melainkan juga memberikan penekanan pada pemahaman konteks sosial-politik, teknik komunikasi persuasif, serta penghormatan terhadap hak kebebasan berpendapat dan berkumpul sebagaimana dijamin konstitusi Indonesia dan instrumen HAM internasional. Institusi ini telah mengadopsi pendekatan pelatihan terpadu yang menggabungkan aspek teoritis dan praktis dalam penanganan demonstrasi, dengan para siswa tidak hanya diberikan pemahaman konseptual tentang HAM dan ketentuan hukum terkait demonstrasi, tetapi juga dilatih dalam simulasi penanganan berbagai skenario demonstrasi dengan tingkat eskalasi yang berbeda-beda. (Ishak, 2016) Pengalaman menunjukkan bahwa demonstrasi yang ditangani dengan pendekatan humanis dan mengedepankan dialog cenderung berlangsung lebih tertib dan minim potensi konflik. Namun, implementasi pendekatan ini membutuhkan perubahan paradigma dan peningkatan kapasitas personel kepolisian melalui pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan. SPN Polda Metro Jaya, sebagai lembaga pendidikan kepolisian, memiliki peran strategis dalam mempersiapkan anggota kepolisian menghadapi tantangan ini (Nugraha et al., 2024).

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa inovasi dalam kurikulum pelatihan, termasuk penggunaan metode pembelajaran experiential learning yang memposisikan para calon polisi dalam situasi menyerupai demonstrasi nyata dan mengharuskan mereka mengambil keputusan dalam waktu terbatas, yang terbukti efektif meningkatkan kemampuan analisis situasi dan pengambilan keputusan sesuai prinsip HAM (M. Imdadun Rahmat, 2014). Analisis dokumen kurikulum mengungkapkan adanya modul khusus tentang "Penanganan Unjuk Rasa Berbasis HAM" yang mencakup materi tentang standar internasional penggunaan kekuatan, teknik negosiasi dan mediasi, serta protokol eskalasi dan de-eskalasi dalam situasi demonstrasi, yang disusun dengan merujuk pada instrumen internasional seperti Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials. Praktik inovatif lainnya termasuk penggunaan teknologi virtual reality untuk mensimulasikan situasi demonstrasi kompleks, kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil dalam merancang skenario pelatihan, dan pelibatan mantan demonstran sebagai narasumber dalam diskusi kelas, yang berkontribusi pada pembentukan perspektif komprehensif dan berimbang mengenai dinamika demonstrasi (Mandang, 2023).

Wawancara dengan alumni SPN yang telah bertugas di lapangan mengungkapkan bahwa pelatihan berbasis HAM yang mereka terima telah memberikan dampak positif pada praktik penanganan demonstrasi, menjadikan mereka lebih percaya diri dalam menerapkan pendekatan dialog dan persuasi, serta lebih mampu mengenali dan merespons tanda-tanda eskalasi konflik sebelum berkembang menjadi kekerasan. Meskipun demikian, penelitian juga mengidentifikasi beberapa tantangan dalam implementasi, seperti kesenjangan antara materi pelatihan dan realitas lapangan yang sering kali lebih kompleks, keterbatasan waktu pelatihan untuk materi HAM yang komprehensif, resistensi dari beberapa instruktur yang masih menganut paradigma keamanan tradisional, serta kesulitan dalam mengukur perubahan sikap dan perilaku jangka panjang sebagai hasil dari pelatihan HAM (Kurniadi, 2023). Untuk mengatasi tantangan-tantangan

tersebut, SPN Polda Metro Jaya telah mengembangkan beberapa strategi adaptif, termasuk penyelenggaraan pelatihan penyegaran secara berkala untuk alumni, pembentukan komunitas praktisi untuk berbagi pengalaman dan pembelajaran, serta kolaborasi dengan institusi akademik untuk melakukan penelitian dan evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas program pelatihan HAM.

DISKUSI

A. Implementasi Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Kurikulum Pelatihan Kepolisian Di Sekolah Polisi Negara Polda Metro Jaya

Implementasi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dalam kurikulum pelatihan kepolisian di Sekolah Polisi Negara Polda Metro Jaya merupakan langkah strategis dalam membentuk anggota kepolisian yang berkompeten serta memiliki kepekaan terhadap nilai-nilai HAM. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, terungkap bahwa SPN Polda Metro Jaya telah mengembangkan kurikulum pelatihan yang menempatkan HAM sebagai komponen integral dalam pendidikan calon anggota kepolisian dengan mengacu pada berbagai instrumen hukum nasional dan internasional (Nurwati Heri Sutanto & Dadang Supriyatna, 2020). Analisis terhadap dokumen kurikulum dan silabi mata pelajaran menunjukkan bahwa materi HAM tidak hanya diajarkan sebagai mata pelajaran tersendiri, tetapi juga diintegrasikan ke dalam berbagai mata pelajaran seperti Pengetahuan Dasar Kepolisian, Etika Profesi Kepolisian, Teknik Pengendalian Massa, dan Manajemen Konflik. Pendekatan integratif ini bertujuan memastikan bahwa pemahaman tentang HAM menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh aspek tugas kepolisian. Materi HAM yang diajarkan kepada peserta pelatihan tidak hanya bersifat teoritis, namun juga praktis sehingga dapat diterapkan dalam situasi nyata, khususnya dalam penanganan aksi demonstrasi. Pembelajaran HAM di SPN Polda Metro Jaya dilaksanakan melalui berbagai metode, mulai dari ceramah, diskusi, studi kasus, hingga simulasi dan role-playing untuk membantu peserta memahami kompleksitas penerapan prinsip-

prinsip HAM dalam tugas kepolisian. Pelatihan ini juga menekankan pentingnya pemahaman kontekstual tentang HAM dalam pelatihan kepolisian, sehingga peserta memahami bahwa HAM bukan konsep abstrak, melainkan prinsip yang harus diterapkan dalam konteks spesifik tugas kepolisian (Priyosantoso, 2022).

Aspek penting lainnya dalam implementasi prinsip-prinsip HAM pada kurikulum pelatihan kepolisian adalah adanya penekanan pada pengembangan keterampilan komunikasi dan negosiasi sebagai bagian integral dari penegakan HAM. Peserta pelatihan dilatih untuk mengembangkan kemampuan mendengarkan aktif, berkomunikasi secara asertif namun tetap menghormati, serta bernegosiasi untuk mencapai solusi yang dapat diterima oleh semua pihak dalam konteks penanganan demonstrasi. Evaluasi reflektif juga menjadi bagian penting dalam pembelajaran HAM di SPN Polda Metro Jaya, dimana setelah setiap simulasi atau latihan praktik, peserta melakukan refleksi dan evaluasi untuk mengidentifikasi tindakan-tindakan yang sesuai atau bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM. Kurikulum pelatihan juga mencakup pengembangan pemahaman tentang standar internasional dalam penggunaan kekuatan, termasuk prinsip-prinsip proporsionalitas, keharusan, dan kehati-hatian serta penerapannya dalam konteks penanganan demonstrasi. Penekanan pada pemahaman tentang hak-hak kelompok rentan dalam konteks demonstrasi juga menjadi bagian dari implementasi prinsip-prinsip HAM dalam kurikulum, dimana peserta diajarkan untuk memberikan perhatian khusus pada kelompok-kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas yang mungkin terlibat dalam demonstrasi. Pemahaman tentang konteks sosial-politik dalam implementasi prinsip-prinsip HAM juga ditekankan, karena pemahaman yang baik tentang konteks sosial-politik suatu demonstrasi dapat membantu mengambil pendekatan yang lebih tepat dan menghindari tindakan yang berpotensi melanggar HAM. Pengembangan pemahaman tentang sistem akuntabilitas juga menjadi bagian dari pembelajaran HAM, dimana peserta

diajarkan bahwa setiap tindakan yang diambil dalam penanganan demonstrasi harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum maupun etis.

Pembelajaran berbasis nilai dalam implementasi prinsip-prinsip HAM menjadi pendekatan yang ditekankan dalam kurikulum pelatihan kepolisian di SPN Polda Metro Jaya, dimana nilai-nilai seperti integritas, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap martabat manusia ditanamkan melalui berbagai kegiatan pembelajaran. Implementasi prinsip-prinsip HAM dalam kurikulum juga mencakup pengembangan pemahaman tentang hak-hak tersangka dan tahanan, termasuk prosedur penangkapan dan penahanan yang sesuai dengan standar HAM, serta hak-hak tersangka dan tahanan dalam proses hukum (Ahmadi et al., 2021). Kurikulum pelatihan juga memberikan penekanan pada pemahaman tentang pendekatan berbasis hak dalam penanganan demonstrasi, dimana peserta diajarkan untuk memandang demonstrasi tidak hanya sebagai masalah keamanan, tetapi juga sebagai ekspresi hak sipil dan politik warga negara. Pembelajaran kolaboratif menjadi metode yang diterapkan dalam implementasi prinsip-prinsip HAM, dimana peserta belajar dalam kelompok kecil untuk mendiskusikan dilema etis dan mengembangkan solusi bersama. Pengembangan keterampilan pengambilan keputusan etis juga menjadi fokus dalam pembelajaran HAM, dimana peserta dilatih untuk mengambil keputusan yang mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk hukum, etika, dan HAM, dalam situasi yang kompleks dan tekanan tinggi. Pemahaman tentang polikulturalisme dalam implementasi prinsip-prinsip HAM juga ditekankan, dimana peserta diajarkan untuk menghargai keberagaman budaya, agama, dan identitas sosial lainnya dalam masyarakat Indonesia, serta bagaimana keberagaman ini dapat memengaruhi dinamika demonstrasi dan cara menanganinya dengan sensitif dan menghormati HAM.

Pengembangan pemahaman tentang komunikasi publik yang efektif juga menjadi bagian dari implementasi prinsip-prinsip HAM dalam kurikulum pelatihan kepolisian di SPN Polda Metro Jaya, dimana peserta diajarkan tentang

cara berkomunikasi dengan media dan masyarakat dalam konteks penanganan demonstrasi. Berdasarkan wawancara dengan lima peserta pelatihan, dapat disimpulkan bahwa implementasi prinsip-prinsip HAM dalam kurikulum pelatihan kepolisian di SPN Polda Metro Jaya dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif, integratif, dan berorientasi pada praktik. Kurikulum tersebut tidak hanya bertujuan untuk membekali peserta pelatihan dengan pengetahuan teoritis tentang HAM, tetapi juga keterampilan praktis untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam tugas kepolisian, khususnya dalam penanganan aksi demonstrasi. Meskipun demikian, implementasi prinsip-prinsip HAM dalam kurikulum pelatihan kepolisian di SPN Polda Metro Jaya masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain meliputi kesenjangan antara teori dan praktik, kurangnya waktu untuk memperdalam materi HAM, dan sulitnya mensimulasikan kompleksitas situasi nyata dalam lingkungan pelatihan. Namun, para peserta pelatihan juga mengakui bahwa adanya komitmen kuat dari institusi untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran HAM memberikan harapan positif bagi masa depan implementasi prinsip-prinsip HAM dalam tugas kepolisian. Integrasi yang komprehensif antara aspek teoritis dan praktis dalam kurikulum pelatihan menjadi kunci keberhasilan dalam membentuk anggota kepolisian yang tidak hanya memahami konsep HAM secara teoritis, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam berbagai situasi yang kompleks di lapangan.

B. Efektivitas Latihan Fungsi Terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia oleh Anggota Kepolisian Polda Metro Jaya

Pengimplementasian prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan tugas Kepolisian memerlukan pendekatan yang komprehensif, sistematis, dan berkelanjutan, dan salah satu aspek penting dalam upaya tersebut adalah latihan fungsi yang dilaksanakan di Sekolah Polisi Negara Polda Metro Jaya. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, ditemukan bahwa latihan fungsi yang dilaksanakan di SPN Polda Metro Jaya telah didesain secara khusus untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM ke dalam berbagai aspek teknis penanganan demonstrasi.

Latihan fungsi ini mencakup berbagai simulasi praktis yang mewakili beragam situasi dan skenario yang mungkin dihadapi oleh anggota kepolisian di lapangan, mulai dari demonstrasi damai hingga situasi yang berpotensi mengalami eskalasi kekerasan. Hasil wawancara dengan peserta pelatihan mengungkapkan bahwa latihan fungsi yang mereka ikuti telah memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana menerapkan prinsip proporsionalitas dalam penanganan demonstrasi, dimana peserta belajar memahami bahwa penggunaan kekuatan harus selalu proporsional dengan ancaman yang dihadapi (Momo Kelana, 2014). Metodologi pembelajaran yang diterapkan dalam latihan fungsi menerapkan pendekatan experiential learning, dimana peserta tidak hanya mendengarkan teori, tetapi langsung mempraktikkan dan merasakan sendiri dinamika penanganan demonstrasi. Latihan fungsi didesain berdasarkan studi kasus nyata yang pernah terjadi di Indonesia, sehingga memberikan gambaran realistis tentang tantangan yang mungkin dihadapi anggota kepolisian dalam menegakkan HAM saat menangani demonstrasi. Setelah setiap simulasi, peserta selalu melakukan refleksi bersama untuk menganalisis tindakan yang diambil, termasuk dari perspektif HAM, yang membantu mereka menginternalisasi prinsip-prinsip HAM dalam pengambilan keputusan.

Latihan fungsi yang dilaksanakan di SPN Polda Metro Jaya juga berperan dalam menumbuhkan kesadaran kritis terhadap isu HAM di kalangan peserta pelatihan, dengan menekankan bahwa penegakan HAM dan pelaksanaan tugas kepolisian bukanlah dua hal yang bertentangan, melainkan saling melengkapi. Dalam latihan, peserta dihadapkan pada dilema etis yang mengharuskan mereka mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk keamanan umum, hak-hak demonstran, dan keselamatan petugas, yang mengajarkan mereka untuk berpikir kritis dan holistik, tidak sekadar mengikuti prosedur standar tanpa mempertimbangkan konteks dan implikasinya terhadap HAM. Aspek psikologis dalam latihan fungsi juga mendapat penekanan, khususnya terkait pengendalian emosi saat menghadapi situasi yang menekan, yang sangat penting untuk

mencegah penggunaan kekuatan berlebihan yang dapat melanggar HAM. Dalam latihan, peserta sengaja ditempatkan dalam skenario yang menantang secara psikologis, seperti menghadapi demonstran yang provokatif atau situasi yang kacau, yang mempersiapkan mereka secara mental untuk menghadapi tekanan nyata di lapangan tanpa kehilangan pengendalian diri dan tetap menghormati HAM. Aspek kolaboratif dalam latihan fungsi juga mendapat perhatian, dimana peserta tidak hanya belajar tentang teknik individu, tetapi juga bagaimana berkoordinasi dengan rekan satu tim untuk memastikan tindakan kolektif yang menghormati HAM, yang memfasilitasi pembentukan pemahaman bersama di antara calon anggota kepolisian tentang pentingnya menjunjung tinggi prinsip-prinsip HAM (Mandang, 2023). Ketika nilai-nilai HAM diinternalisasi secara kolektif, keputusan dan tindakan di lapangan akan lebih konsisten dengan prinsip-prinsip tersebut, sehingga aspek kolaboratif ini menjadi komponen penting dalam latihan fungsi yang efektif.

Penelitian ini juga mengungkap beberapa aspek spesifik dari latihan fungsi yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan kemampuan anggota kepolisian dalam menegakkan HAM saat menangani demonstrasi (Asyidiqy, 2022). Pertama, latihan fungsi memberikan pemahaman praktis tentang batasan-batasan penggunaan kekuatan yang sesuai dengan standar HAM internasional, dimana peserta pelatihan dilatih untuk memahami prinsip *necessity* dan *proportionality* dalam konteks nyata dan belajar bahwa penggunaan kekuatan harus selalu menjadi pilihan terakhir dan harus proporsional dengan ancaman yang dihadapi. Kedua, latihan fungsi mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif, yang sangat penting dalam upaya de-eskalasi konflik dan penyelesaian damai, dimana peserta dilatih untuk berkomunikasi dengan demonstran secara jelas, tidak mengancam, dan menghormati, dan belajar bahwa komunikasi yang baik dapat mencegah situasi memburuk dan mengurangi kebutuhan penggunaan kekuatan. Ketiga, latihan fungsi memperkuat kemampuan analisis situasional yang memungkinkan anggota kepolisian untuk mengidentifikasi potensi

pelanggaran HAM dan mengambil tindakan pencegahan, dimana peserta dilatih untuk "membaca" dinamika massa dan mengidentifikasi tanda-tanda awal eskalasi, sehingga dapat mengambil tindakan proaktif untuk mencegah situasi berkembang menjadi kekerasan yang berpotensi melanggar HAM. Keempat, latihan fungsi memfasilitasi pemahaman yang lebih dalam tentang aspek legal dan etis dalam penanganan demonstrasi, dimana peserta dibekali dengan pengetahuan tentang berbagai instrumen hukum yang melindungi hak berdemostrasi serta batasan-batasannya, dan pemahaman hukum yang komprehensif membuat mereka lebih percaya diri dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip HAM. Kelima, latihan fungsi membangun kesadaran tentang pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam penanganan demonstrasi, dimana peserta dilatih untuk mendokumentasikan tindakan yang diambil selama penanganan demonstrasi dan memastikan bahwa setiap penggunaan kekuatan dapat dipertanggungjawabkan.

Meskipun latihan fungsi yang dilaksanakan di SPN Polda Metro Jaya dinilai efektif dalam meningkatkan kapasitas anggota kepolisian untuk menegakkan HAM saat menangani demonstrasi, penelitian ini juga mengungkap beberapa tantangan dalam implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan antara situasi latihan dan realitas lapangan, dimana meskipun latihan sudah dibuat serealistis mungkin, tetap ada faktor-faktor yang tidak dapat disimulasikan secara sempurna, seperti tekanan media, politik, dan dinamika sosial yang kompleks. Keterbatasan waktu juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan latihan fungsi, dimana untuk benar-benar menginternalisasi prinsip-prinsip HAM dalam pengambilan keputusan dibutuhkan latihan yang intensif dan berulang, namun waktu yang tersedia seringkali terbatas karena banyaknya materi yang harus dipelajari. Tantangan lain adalah adanya resistensi dari sebagian peserta terhadap pendekatan berbasis HAM, dimana beberapa peserta masih memiliki mindset bahwa pendekatan berbasis HAM dapat menghambat efektivitas penanganan demonstrasi. Tantangan dalam mengukur efektivitas

latihan fungsi terhadap perubahan perilaku jangka panjang juga menjadi perhatian, karena sulit untuk mengukur sejauh mana latihan fungsi benar-benar mengubah cara berpikir dan bertindak seseorang dalam jangka panjang, terutama ketika menghadapi situasi yang sangat menekan. Tantangan dalam konteks budaya organisasi yang lebih luas juga teridentifikasi, dimana efektivitas latihan fungsi dapat terhambat jika budaya organisasi dan kepemimpinan di lapangan tidak mendukung penerapan prinsip-prinsip HAM (Latipah Nasution, 2020). Meskipun menghadapi berbagai tantangan, peserta pelatihan secara umum mengakui efektivitas latihan fungsi dalam meningkatkan kapasitas mereka untuk menegakkan HAM saat menangani demonstrasi, termasuk dalam mengubah perspektif mereka tentang demonstrasi dari sekadar ancaman keamanan menjadi ekspresi hak demokratis warga negara yang harus difasilitasi dan dilindungi oleh kepolisian.

Aspek keberlanjutan dari latihan fungsi menjadi faktor kunci yang berkontribusi pada efektivitasnya dalam meningkatkan kapasitas anggota kepolisian untuk menegakkan HAM. Yang membuat latihan fungsi ini efektif adalah pendekatannya yang berkelanjutan, dimana prinsip-prinsip HAM diintegrasikan ke dalam semua aspek pelatihan dan diperkuat melalui berbagai kegiatan, bukan hanya dipahami secara teoritis, tetapi juga terinternalisasi dalam praktik sehari-hari. Latihan fungsi juga membantu peserta mengembangkan kepercayaan diri dalam menangani situasi yang kompleks dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip HAM, dan merasa lebih siap untuk menghadapi berbagai skenario penanganan demonstrasi karena latihan yang intensif dan komprehensif. Latihan fungsi juga membantu membangun kerjasama tim yang efektif, yang sangat penting dalam penanganan demonstrasi yang kompleks. Latihan fungsi juga berperan dalam mengembangkan kemampuan reflektif yang penting untuk penegakan HAM, dimana peserta terbiasa untuk menganalisis setiap tindakan dari perspektif HAM dan mempertimbangkan implikasinya secara mendalam, dan kemampuan reflektif ini sangat penting untuk

pembelajaran berkelanjutan dan peningkatan praktik kepolisian yang menghormati HAM. Dampak latihan fungsi pada pengembangan empati terhadap para demonstran juga menjadi sorotan, dimana melalui role-playing dan simulasi, peserta belajar untuk memahami perspektif dan motivasi para demonstran, yang membantu mereka menangani situasi dengan lebih bijaksana dan menghormati HAM, dan empati ini juga membantu membangun kepercayaan dengan masyarakat, yang pada gilirannya dapat memfasilitasi penanganan demonstrasi yang lebih damai dan kooperatif (Asyidiqy, 2022). Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa latihan fungsi di SPN Polda Metro Jaya memiliki efektivitas yang signifikan dalam meningkatkan kapasitas anggota kepolisian untuk menegakkan HAM saat menangani demonstrasi, yang terlihat dari meningkatnya pemahaman peserta tentang prinsip-prinsip HAM, berkembangnya keterampilan praktis dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut, serta terjadinya perubahan paradigma dalam memandang demonstrasi dan peran kepolisian dalam konteks masyarakat demokratis.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan di Sekolah Polisi Negara Polda Metro Jaya, dapat disimpulkan bahwa terdapat transformasi signifikan dalam implementasi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia pada kurikulum pelatihan kepolisian, khususnya dalam konteks penanganan aksi demonstrasi yang beralih dari model represif menjadi lebih humanis. Pendekatan integratif yang diterapkan tidak hanya memposisikan HAM sebagai mata pelajaran tersendiri, namun terintegrasi dalam berbagai aspek pendidikan termasuk Pengetahuan Dasar Kepolisian, Etika Profesi, Teknik Pengendalian Massa, dan Manajemen Konflik, sehingga menjadi bagian tidak terpisahkan dari seluruh aspek tugas kepolisian. Latihan fungsi yang dilaksanakan dengan metodologi experiential learning terbukti efektif dalam membangun kapasitas anggota kepolisian untuk menerapkan prinsip-prinsip HAM dalam penanganan demonstrasi, termasuk pemahaman mendalam tentang batasan penggunaan kekuatan, pengembangan keterampilan komunikasi persuasif, serta

analisis situasional untuk pencegahan eskalasi konflik. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan dalam implementasi seperti kesenjangan antara teori dan praktik lapangan, keterbatasan waktu pelatihan, serta kesulitan dalam mengukur perubahan perilaku jangka panjang sebagai hasil dari pelatihan HAM. Berdasarkan temuan penelitian, direkomendasikan agar institusi kepolisian terus mengembangkan program pelatihan penyegaran secara berkala bagi alumni, memperkuat komunitas praktisi untuk berbagi pengalaman, serta membangun kolaborasi dengan institusi akademik dan organisasi masyarakat sipil untuk evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas program pelatihan HAM. Penguatan budaya organisasi dan kepemimpinan yang mendukung penerapan prinsip-prinsip HAM juga menjadi aspek krusial yang perlu dikembangkan untuk memastikan internalisasi nilai-nilai HAM dalam praktik penanganan demonstrasi di lapangan.

REFERENSI

- Ahmadi, N., Arief, Z. A., & Wibowo, S. (2021). Pengaruh Metode Pembelajaran Dan Minat Belajar Peserta Didik Terhadap Hasil Belajar Mata Pelajaran Polmas Di Sekolah Polisi Negara Polda Metro Jaya. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 10(1), 36–43. <https://doi.org/10.32832/tek.pend.v10i1.3995>
- Asyidiqy, R. (2022). Sanksi Pidana Bagi Demonstran Yang Anarkis. *Gorontalo Law Review*, 5(2), 354–360.
- Carenina, Kania Esa, Nova Monaya, dan Ilman Khairi. "Kajian Hukum Fungsi Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penggelapan (Studi Fungsi Sat Reskrim Polres Bogor)." *Karimah Tauhid* 3, no. 5 (2024): 5349. e-ISSN 2963-590X.
- Ekatjahjana Widodo. (2015). *Negara Hukum, Konstitusi, dan Demokrasi: Dinamika dalam Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jember University Press.
- Ishak, O. S. (2016). *Pancasila, Hak Asasi Manusia dan Ketahanan Nasional*. Perpustakaan Nasional:
- Kurniadi, D. (2023). Kualitas Pelayanan Pendidikan Bintara Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Sekolah Polisi Negara (SPN) Lido Polda Metro Jaya. *Karimah Tauhid*, 2(2), 2272–2283.
- Latipah Nasution. (2020). Hak Kebebasan Berpendapat dan Bereksprei Dalam Ruang Publik di Era Digital. *Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan*, 4(3).
- M. Imdadun Rahmat. (2014). Hak Asasi Manusia. *Jurnal Komisi HAM*, 11(1), 1–244.

- Mandang, O. A. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Demonstrasi Bersifat Anarkis Yang Berakibat Pada Pengerusakan Barang Milik Negara. *Lex Administratum*, XII(5), 1–11.
- Momo Kelana. (2014). *Hukum Kepolisian*. PTIK.
- Nugraha, I. P. A., Mulyadi, & Rangkuti, S. H. (2024). Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian. *Karimah Tauhid*, 3(4), 5021–5035. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i4.13012>
- Nurwati Heri Sutanto & Dadang Supriyatna. (2020). Analisis Yuridis Fungsi Dan Peran Tenaga Pendidik Dalam Pembentukan Bintara Di SPN Polda Metro Jaya. *De'rechsstaat*, 6(1), 51–71. <https://doi.org/10.30997/jhd.v6i1.2660>
- Priyosantoso, R. (2022). Hak Asasi Manusia di Indonesia: Tinjauan Politik Hukum Era Reformasi. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 15(3), 10. <https://doi.org/10.35879/jik.v15i3.341>
- Soekanto, S. (2014). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.